

BAB V

KESIMPULAN

Yunani merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa dan juga pengguna mata uang tunggal euro. Yunani menjadi anggota resmi Uni Eropa pada tahun 1981 dan menjadi salah satu negara yang menggunakan mata uang tunggal Uni Eropa mulai tahun 2002. Yunani memiliki prekonomian yang kurang stabil dibanding dengan negara-negara sesama anggota Uni Eropa lainnya. Yunani dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bentuk pemerintahannya adalah parlemen. Sejak awal akan bergabung dengan Uni Eropa, dalam memperoleh keanggotaan sebagai pengguna mata uang euro, Yunani memanipulasi laporan ekonominya agar dapat memenuhi persyaratan rekrutmen euro, namun lama-kelamaan dampak dari manipulasi tersebut mulai terlihat dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami oleh Yunani. Pada dasarnya, pengeluaran negara Yunani sering melebihi anggaran yang sudah ditentukan sehingga terkesan boros.

Dengan terjadinya krisis keuangan global pada 2008, Yunani mulai merasakan dampak dari pemborosan negaranya. Ditambah dengan manipulasi laporan ekonomi yang sebelumnya dilakukan Yunani juga perlahan menyeret Yunani kedalam kesulitan ekonomi yang berkesinambungan. Sudah banyak bantuan dan program yang dirancang untuk mengentaskan Yunani dari krisis yang dialami. Kreditor utama Yunani atau

Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF) banyak memberikan bantuan berupa pinjaman dana untuk Yunani. Bantuan tersebut diikuti dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Yunani. Disatu sisi Yunani merasa terbantu dengan bantuan yang didapat, namun disisi lain Yunani lama-kelamaan menjadi terpuruk karena syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Yunani. Meskipun syarat-syarat telah dilakukan, tidak serta-merta mengentaskan Yunani dari kesulitannya.

Butuh waktu lama bagi Yunani untuk menyelesaikan permasalahannya. Bahkan bisa dikatakan, program penghematan yang dilakukan hanya akan semakin menyiksa Yunani karena terjadi secara berlarut-larut. Yunani berada dalam keadaan terdesak pada 30 Juni 2015 karena Yunani harus membayar hutang kepada kreditor yakni IMF, padahal Yunani tidak memiliki dana untuk membayarnya. Jadilah Yunani gagal membayar hutang sampai batas waktu yang ditentukan. Uni Eropa tidak tinggal diam dengan hal ini karena khawatir jika Yunani dibiarkan saja ditakutkan efeknya akan menjalar ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Uni Eropa memberikan tawaran bantuan beserta syarat yang harus dipenuhi Yunani sampai batas waktu tertentu namun Yunani menolaknya.

Dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa pada saat mengalami krisis tahun 2015 pemerintah Yunani melalui Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dengan tegas enggan menerima proposal bantuan yang diberikan kepada Yunani. Penulis menyimpulkan berdasarkan analisa dengan penelitian menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Graham

T. Allison pada model pertama yakni aktor rasional dan model ketiga, politik birokratik. Tsipras tidak ingin menerima bantuan dari Uni Eropa beserta persyaratannya untuk menyelesaikan pembayaran hutang kepada IMF yang sudah jatuh tempo karena menganggap syarat yang diberikan bersama bantuan dianggap memberatkan. Pemerintah tidak ingin membebani rakyatnya dengan syarat-syarat yang akan membuat rakyat semakin menderita.

Sedangkan penolakan juga diserukan oleh rakyat Yunani. Referendum dilangsungkan pada 5 Juli 2015, pelaksanaan referendum ini didukung oleh 179 dari 300 anggota parlemen Yunani. Penolakan rakyat Yunani dapat dilihat dari besarnya suara rakyat yang menyatakan “tidak” atau satu suara dengan pemerintah untuk menolak bantuan dari Uni Eropa. Penolakan rakyat Yunani ini diikuti dengan keinginan rakyat yang menuntut perubahan bagi negaranya. Perubahan tersebut meliputi tuntutan pengembalian standar kehidupan rakyat yang selama ini menurun dan keinginan untuk menurunkan angka pengangguran di Yunani yang jumlahnya semakin naik setiap tahunnya. Referendum ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Yunani dalam perundingan dengan Uni Eropa. Sebelumnya rakyat banyak melakukan aksi demonstrasi untuk mendukung pemerintah agar menolak bantuan yang akan diberikan karena syaratnya dianggap memberatkan. Tuntutan rakyat ini berdasarkan apa yang rakyat rasakan selama Yunani terperangkap dalam krisis hutang selama bertahun-tahun. Rakyat sudah bosan dengan adanya program-program bantuan yang dampaknya harus dirasakan oleh rakyat selama ini.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap dengan menguraikan alasan-alasan dibalik penolakan Yunani terhadap bantuan yang diberikan untuk negaranya dalam menghadapi krisis dapat bermanfaat bagi perkembangannya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya untuk mata kuliah Kajian Uni Eropa karena dapat memberikan informasi mengenai peranan Uni Eropa dalam membantu negara anggotanya dalam menghadapi masalah dalam kasus permasalahan ekonomi Yunani. Alasan-alasan atas penolakan Yunani terhadap bantuan dari Uni Eropa untuk menghadapi krisis tahun 2015 disadari oleh penulis masih terlalu umum dan masih banyak kekurangan karena terbatasnya sumber dan data yang valid terhadap bahasan penulis.

Dari hasil penelitian ini dapat diusulkan beberapa titik penelitian lanjutan, sebagai contoh bagaimana tindak lanjut Uni Eropa terhadap permasalahan Yunani?. Sekarang ini terlihat banyak terjadi perkembangan maupun gejolak-gejolak ekonomi dikawasan Uni Eropa dan diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi berbagai penelitian kedepannya.

